

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola organisasi yang baik menjadi salah satu prioritas untuk keberlangsungan organisasi di waktu yang akan datang. Hadirnya konsep *Good Corporate Governance* memberikan cara pandang baru bagi setiap organisasi agar menata dan mengelola lingkungan organisasinya secara baik dan saling bersinergi agar bisa mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Syakroza (2005) mengutarakan tiga elemen dalam sistem tata kelola yang baik yakni struktur tata kelola, mekanisme tata kelola dan prinsip tata kelola. Ketiga elemen ini menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Istilah *Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan sangat sering didengar dan diterapkan dalam konteks perusahaan yang berorientasi pada *profit* atau laba. Tidak hanya di lingkungan perusahaan saja akan tetapi konsep inipun mendapat perhatian oleh organisasi sektor publik lainnya.

Konsep tata kelola yang baik saat ini menjadi impian bagi semua masyarakat khususnya bagi organisasi sektor publik yang melayani dan mengatur hajat hidup banyak orang. Contoh fenomena yang masih sering dijumpai dan selalu dirasakan adalah buruknya pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebagai organisasi sektor publik yang bekerja melayani masyarakat. Penyebab dari munculnya fenomena tersebut apabila ditelusuri secara lebih mendalam maka akan sedikit menyinggung pada

konsep dan tata kelola pemerintahan yang kurang baik atau *Bad Corporate Governance* sehingga berimplikasi pada buruknya kualitas pelayanan pada masyarakat.

Implementasi tata kelola yang efektif dan efisien tidak hanya sebatas di lingkungan organisasi yang berorientasi pada profit dan pemerintah saja akan tetapi penting diterapkan bagi organisasi non *profit* lainnya seperti Gereja. Gereja sebagai salah satu lembaga non *profit* yang bergerak dibidang pelayanan hidup rohani dan iman umat melalui ajaran dan hukum-hukumnya memerlukan tata kelola yang baik karena mengandalkan partisipasi umat sebagai roda penggerak melalui derma dan donasi (Mappadang, 2019). Banyak berita dan informasi yang mengabarkan tentang munculnya masalah dibidang pelayanan dalam lembaga Gereja menunjukkan bahwa Gereja harus menerapkan konsep tata kelola yang baik agar menjadi lembaga non sekuler yang suci dan sakral sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan umatnya.

Salah satu aspek penting yang sangat perlu diperhatikan Gereja sebagai lembaga non *profit* adalah berkaitan dengan tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan yang baik dalam bidang keuangan Gereja akan membawa manfaat yang besar bagi umat dan sebaliknya jika pengelolaan keuangannya dirasa tidak baik, maka akan menimbulkan masalah dan konflik di dalam tubuh Gereja itu sendiri sehingga berujung pada munculnya rasa ketidakpercayaan umat kepada pemimpin dan pengelola Gereja. Contoh kasus yang paling nyata akan lemahnya pengelolaan keuangan di Gereja adalah munculnya kasus korupsi yang terpublikasi ke media dan menjadi bahan pembicaraan

oleh berbagai pihak. Tabel 1.1 menyajikan masalah-masalah dugaan pengelolaan keuangan Gereja yang korup sehingga menjadi berita yang hangat diperbincangkan. Tindakan melakukan korupsi (*fraud*) oleh anggota Gereja baik itu pemimpin Gereja, Dewan Pengurus Gereja maupun anggota Gereja lainnya dipengaruhi oleh 3 faktor yakni *agency theory*, *triangel fraud theory*, dan *GONE theory* (Soepardi, 2010). Tindakan *fraud* ini akan semakin parah jika didukung dengan lemahnya sistem tata kelola keuangan dan sistem pengendalian internal. Untuk mengatasi persoalan ini Gereja perlu terus mengembangkan tata pengembalaan, sistem keuangan, sistem administrasi yang transparan, akuntabel dan kredibel disetiap titik lokasi wilayah Gereja, sehingga Gereja sebagai minoritas kreatif dapat menjadi salah satu pelopor di dalam pemberantasan salah satu budaya negatif di Negara kita yaitu korupsi (*The Chatolic Way*, 134).

Tabel 1.1 Kasus-kasus Dugaan Korupsi di Lembaga Gereja

No	Sumber Berita	Ringkasan Kasus dan Kerugian
1.	www.regional.kompas.com/dugaan Korupsi dana Gereja Rp 4,7 Triliun Jemaat saling lapor	Kasus ini terjadi pada tahun 2013. Kasus dugaan korupsi dana Gereja senilai 4,7 Triliun oleh pendeta untuk kepentingan pribadi. Kasusnya masih dialami apakah menyebabkan kerugian negara.

Tabel 1.1 Lanjutan

2.	www.beritasatu.com/dugaan Penyimpangan dana hibah Gereja di Kabupaten Mappi dilaporkan ke KPK	Dana hibah Gereja yang berasal dari anggaran PAGU sebesar Rp. 22 miliar dan hanya terserap 6 miliar (hasil audit BPK). Indikasinya negara mengalami kerugian sebesar Rp. 16 miliar. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Papua, tetapi tidak ada tindak lanjut sehingga akhirnya masyarakat Papua berinisiatif melaporkan ke KPK. Kasus ini terjadi pada tahun 2015.
3.	www.nasional.republika.co.id/jemaat minta bekas bendahara GKI yang gelapkan dana Gereja dihukum	Dugaan korupsi senilai Rp. 2,3 miliar dana Gereja GKI Serpong, pemalsuan data dan penyalagunaan wewenang oleh bendahara Gereja. Kasus ini terjadi pada tahun 2015.
4.	www.timorraya.com/diduga-korupsi-dana-gereja-128-juta-dua-terdakwa-ini-disidangkan	Dugaan tindak korupsi dana bantuan sosial dari Kementrian Agama RI sebesar Rp.1 miliar untuk pembangunan gedung Gereja St. Maria Banneaux, Lewoleba, Kabupaten Lembata, NTT. Indikasi kerugian negara sebesar Rp. 128.033.650. Kasus ini terjadi pada tahun 2011.
5.	www.medan.tribunnews.com/pendeta dan jemaat gereja methodist indonesia demo ke mapolda.	Dugaan korupsi dana dari Kemenpera oleh pengurus Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia senilai Rp. 1,6 miliar.

Sumber: Berita dari Internet.

Dari kasus di atas menunjukkan bahwa ternyata beberapa lembaga Gereja masih memiliki kelemahan di dalam mengelola keuangannya sehingga terjadi kecurangan atau *fraud* yang berdampak buruk bagi nama

lembaga Gereja itu sendiri. Fenomena ini layaknya gunung es yang hanya muncul sebagian ke permukaan dan terdapat banyak bongkahan besar yang menggumpal di bawahnya. Hal ini dapat terjadi karena tata kelola yang kurang efektif dan efisien serta lemahnya pengendalian internal yang berjalan di dalam lembaga Gereja secara khusus terkait dengan tata kelola keuangan.

Dalam *Staatsblad* 1972 No 156 tanggal 29 Juni 1925 menyatakan bahwa Gereja merupakan badan hukum ketika sudah memenuhi syarat yakni memiliki harta kekayaan sendiri, mempunyai usaha untuk tujuan tertentu yakni pelayanan keagamaan serta adanya petugas dan anggota sehingga Gereja sebagai badan hukum berstatus sebagai lembaga Gereja dan secara implisit diatur di dalam organisasi kemasyarakatan. Gereja digolongkan ke dalam organisasi non laba karena bisnis orientasinya adalah pada pelayanan hidup rohani dan keagamaan.

Penelitian ini akan meneliti tentang tata kelola keuangan Gereja Katolik yang berada di Keuskupan Atambua khususnya terkait dengan tata kelola keuangan Gereja di Paroki St. Agustinus Fatubena Dekanat Belu Utara Keuskupan Atambua. Peneliti memilih Keuskupan Atambua khususnya di Paroki ini karena di Keuskupan ini belum memiliki buku panduan tertulis di dalam perencanaan, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pihak Keuskupan hanya mengontrol keuangan disetiap Paroki melalui surat Penegasan Pastoral, Surat Uskup, dan Penyampaian Kebijakan Keuangan Keuskupan Secara Lisan pada saat kegiatan Animasi Kinerja Pastoral. Lembaga Keuskupan sebagai pihak tertinggi yang membawahi semua

wilayah Dekanat dan Paroki di Keuskupan Atambua harusnya memiliki peran sentral di dalam melakukan tata kelola dan pengendalian yang baik sehingga semua paroki memiliki satu garis komando dalam mengikuti sistem tata kelola yang ada, secara khusus terkait dengan tata kelola keuangan Gereja. Selain itu sistem pelaporan keuangan di Keuskupan sendiri belum mengikuti panduan sesuai dengan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas yang Berorientasi Nonlaba akan tetapi masih menggunakan sistem manual yaitu dicatat dalam *form* pendapatan dan pengeluaran atau diketik dalam komputer (Nesi, 2016).

Hal ini sangat kontras ketika dibandingkan dengan Gereja Katolik yang berada di Keuskupan lain misalnya di Keuskupan Agung Semarang yang memiliki buku Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki. Buku ini bertujuan agar Paroki, Paroki Administratif, Stasi, Wilayah, Lingkungan, Kelompok Kategorial, dan Unit Karya dalam Paroki dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dan proses akuntansi sesuai dengan Pedoman Keuangan dan Akuntansi yang telah ditetapkan (PTKAP, 2008). Selain itu buku Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki ini juga bertujuan untuk membantu Paroki dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai tujuannya yaitu pengambilan keputusan yang rasional dalam hal pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki, menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan serta menjadi bahan acuan yang dipenuhi oleh Paroki dalam menyusun laporan keuangan.

Dari uraian penjelasan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang tata kelola keuangan di Gereja Katolik yang berada di Paroki St. Agustinus Fatubenao, Dekanat Belu Utara Keuskupan Atambua dengan tujuan untuk mengetahui pola pencatatan keuangan, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan yang selama ini berjalan di Paroki St. Agustinus Fatubenao Dekanat Belu Utara Keuskupan Atambua.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan oleh peneliti di atas maka peneliti merumuskan inti permasalahan menjadi dua rumusan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimana tata kelola keuangan Gereja di Paroki St. Agustinus Fatubenao Keuskupan Atambua ?
2. Apa saja masalah yang muncul dalam melakukan tata kelola keuangan Gereja di Paroki St. Agustinus Fatubenao Keuskupan Atambua ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang berlokasi di Gereja Katolik Paroki St. Agustinus Fatubenao ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola keuangan Gereja yang selama ini berjalan yang terdiri pencatatan keuangan, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan Gereja Paroki St Agustinus Fatubenao. Selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang selama ini terjadi dalam melakukan tata kelola keuangan Gereja di lokasi penelitian. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para Dewan pengurus dan pengelola

Keuangan di Paroki St. Agustinus Fatubenao Dekanat Belu Utara Keuskupan Atambua. Penelitian ini bermanfaat bagi mereka dalam hal menambah wawasan dalam menata dan mengelola keuangan yang baik sesuai dengan standar dan prosedur akuntansi khususnya terkait dengan akuntansi Paroki.

1.4 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup dan fokus penelitian hanya pada tata kelola keuangan yaitu pencatatan keuangan di Paroki, pengelolaan keuangan Paroki, dan pelaporan keuangan Paroki yang selama ini berjalan di Paroki St. Agustinus Fatubenao Dekanat Belu Utara Keuskupan Atambua.

Dasar pedoman tata kelola keuangan Gereja yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan rujukan adalah berdasarkan pada Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Semarang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.4 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan agar dapat memberikan gambaran terhadap realitas yang sebenarnya. Analisis data

(Miles dan Huberman), mengungkapkan bahwa ada terdapat tiga tahap dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan di lapangan. Proses reduksi data ini dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat pengkodean, menelusuri tema, membuat ringkasan dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses pendeskripsian sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif diformulasikan dalam bentuk naratif teks dengan maksud dan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran

kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian berlangsung. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*qualitative research*). Bogdan dan Taylor (L.J Maleong 2011:4) mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, mendeskripsikan perilaku yang diamati, mendeskripsikan peristiwa di lapangan serta mendeskripsikan pola kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola keuangan Gereja di Paroki St.Agustinus Fatubenao dan juga untuk mengetahui apa saja masalah yang dialami dalam pengelolaan Keuangan di Paroki St.Agustinus Fatubenao. Dalam mengumpulkan, mengungkapkan berbagai masalah dan tujuan yang hendak dicapai maka, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Menurut Sugiyono (2008:15) bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik yang dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono

(2012:103) menyatakan bahwa metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna.

1.5.2 Objek, Waktu dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi pokok pembahasan dalam melaksanakan suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pada tata kelola keuangan Gereja yang terdiri dari pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan Gereja Katolik. Waktu penelitian akan berlangsung dari bulan Desember 2019 - Februari 2020. Tempat penelitian berlokasi di Gereja Paroki St. Agustinus Fatubenao Dekanat Belu Utara Keuskupan Atambua, Kelurahan Fatubenao, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Dokumentasi, dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Melalui cara ini peneliti mencari dan menggali informasi dalam bentuk dokumen atau file untuk memperoleh gambaran umum tentang tata kelola keuangan Gereja yang berada di Paroki St. Agustinus Fatubenao.
2. Observasi, Jogyanto (2017) mendefinisikan observasi sebagai suatu metode atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati secara langsung objek data di lokasi

penelitian. Penelitian ini akan menggunakan teknik observasi sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data di lokasi penelitian yaitu di Gereja Paroki St. Agustinus Fatubenao.

3. Wawancara, Menurut Jogiyanto (2017) menyebutkan bahwa wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Peneliti akan mewawancarai Pastor Paroki, Dewan Keuangan Paroki, dan Bendahara Paroki serta informan lain yang peneliti anggap memiliki peran di dalam tata kelola keuangan, di Paroki St. Agustinus Fatubenao. Peneliti akan melakukan wawancara terstruktur dimana peneliti terlebih dahulu menyusun beberapa butir pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Hal ini bertujuan agar topik dalam wawancara lebih fokus dan terarah pada tujuan yang dimaksud dan terhindar dari pembicaraan yang bias.

Dalam wawancara ini peneliti akan menggali informasi tentang pengelolaan keuangan di lokasi penelitian dari narasumber yang peneliti anggap memiliki data dan informasi yang akurat yakni:

- a. Pastor Paroki sebagai penanggungjawab tertinggi di Paroki untuk mendapatkan informasi tentang pemahaman, wewenang, serta tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan di Paroki.
- b. Dewan Keuangan Paroki dan Bendahara Paroki sebagai pihak yang mengurus dan membantu mengelola keuangan di Paroki. Peneliti ingin memperoleh informasi tentang bagaimana

pencatatan dan pelaporan keuangan di Paroki apakah telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang menjelaskan tentang apa yang akan diteliti dan apa tujuannya. Dengan merujuk pada permasalahan yang dimuat di latar belakang maka peneliti akan membuat dua buah butir rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta batasan masalah untuk penelitian ini. Bab ini juga berisi metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian di lokasi penelitian.

Bab II Tata Kelola Keuangan dan Akuntansi Paroki

Bab ini berisi teori dan konsep yang relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Teori-teori dalam bab ini berisi tentang tata kelola keuangan Gereja dan sistem akuntansi yang berlaku untuk organisasi sektor publik.

Bab III Gambaran Umum Paroki St. Agustinus Fatubenao

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Gereja Katolik di Paroki St. Agustinus Fatubenao yang berada di Keuskupan Atambua. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang situasi dan kondisi di lokasi penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil temuan yang diperoleh setelah mengikuti rangkaian proses penelitian tentang tata kelola keuangan Gereja di Paroki St. Agustinus Fatubenao.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang berasal dari hasil penelitian, saran, dan menjelaskan keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini.

